

PROGRES IMPLEMENTASI SASARAN RENCANA AKSI KORSUP

di

Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Pontianak, 9 September 2015

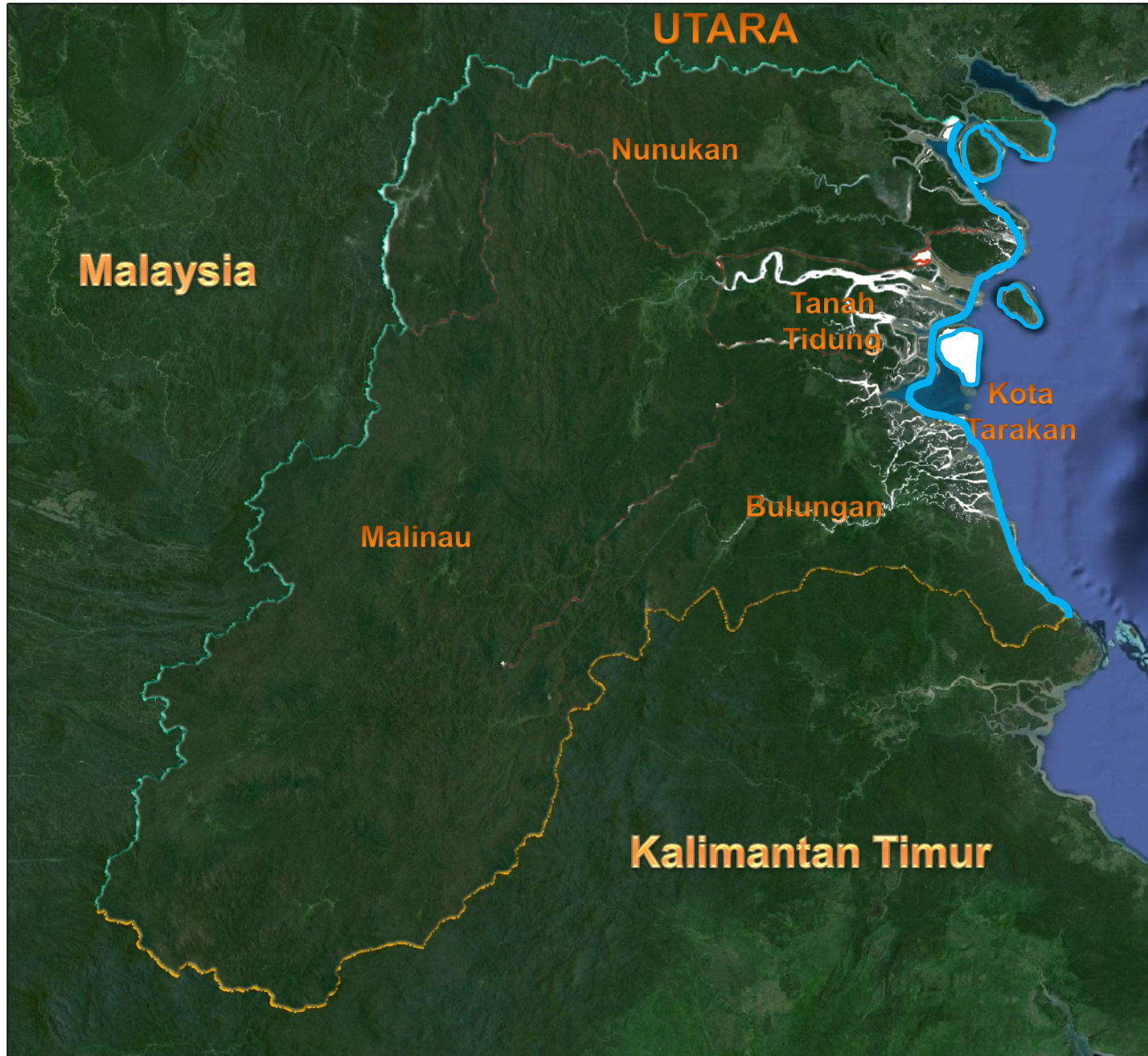


**DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

I. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kalimantan Utara (Kaltara) adalah Daerah Otonom Baru (DOB) yang merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi provinsi lewat rapat paripurna DPR pada 25 Oktober 2012. **Provinsi baru ini resmi ditetapkan pada 16 November 2012 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.** Ibukota Provinsi Kaltara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Provinsi Kaltara merupakan provinsi ke-34 atau provinsi baru ketujuh yang dibentuk pada masa setelah reformasi dan sejak kebijakan otonomi digulirkan di Indonesia (1999). **Provinsi ini meliputi lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupten Tana Tidung.**

GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN



Luas Wilayah

Tarakan
250,80 km²

Tanah Tidung
4.828,58 km²

Bulungan
13.925,72 km²

Nunukan
13.841,90 km²

Malinau
42.620,70
km²

Garis Pantai Provinsi Kalimantan Utara
3.517,13 km

Panjang Perbatasan :
-/+ 1.034 km

Provinsi Kaltara memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 75.467,70$ Km² atau kurang lebih sepertiga dari luas wilayah provinsi induk Kaltim. Kabupaten terluas di Kaltara adalah kabupaten Malinau, sedangkan Kota Tarakan sebagai wilayah administratif terkecil. Lebih jelas, luas wilayah administratif masing-masing kabupaten/kota dirangkum dalam Tabel 1.

Luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)*
1.	Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72
2.	Malinau	Malinau	42.620,70
3.	Nunukan	Nunukan	13.841,90
4.	Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58
5.	Tarakan	Tarakan	250,80
Total			75.467,70

II. DATA DASAR KAWASAN DAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN

Data dasar kawasan dan potensi sumberdaya hutan meliputi data-data yang berhubungan dengan fungsi dan tipe kawasan hutan, kondisi geomorfologis, klimatologis, hidro-orologis serta keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan hutan. Data-data tersebut merupakan modal awal dalam mendukung perencanaan pengelolaan hutan yang lebih terarah dan terukur di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Berdasarkan analisis peta lampiran SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, diketahui areal yang difungsikan sebagai kawasan hutan mencapai 5.629.112 ha atau sekitar 80% dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan hutan produksi yang dapat dikonversi, seluas 3.304.802 ha. Hutan lindung seluas 1.055.771 ha. Hutan konservasi yang merupakan bagian dari Taman Nasional Kayan Mentarang menempati kawasan seluas 1.268.539 ha.

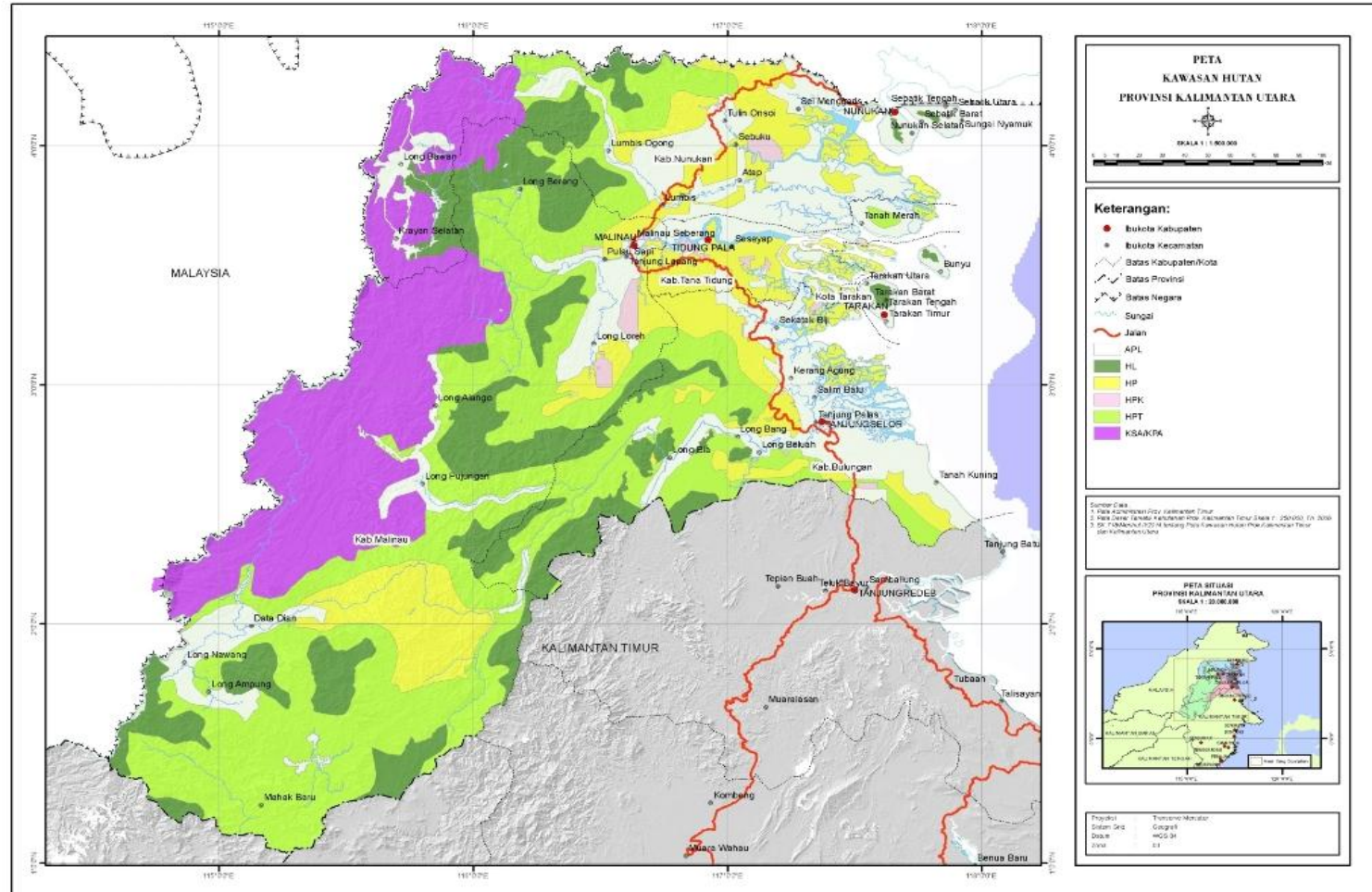
Luas Hutan Berdasarkan fungsi dan Sebarannya (Ha)

Sumber : Analisis peta lampiran SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Tabel2. Luas Areal Berdasarkan Fungsi dan Sebarannya

Wilayah Adminsitrat	Hutan Produksi				Hutan Konservasi				Hutan	Fungsi	Total
	HP	HPT	HPK	Total HP	KSA	KPA	TB	Total HK	Lindung	(APL)	
Bulungan	256.655	426.369	5.586	688.61	-	-	-	-	206.717	412.261	1.307.589
Nunukan	274.432	189.061	13.514	477.007	-	269.677	-	269.677	156.2	496.45	1.399.334
Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	6.997	18.285	25.282
Malinau	364.811	1.570.815	30.474	1.966.101	-	998.862	-	998.862	685.856	323.498	3.974.316
Tana	154.48	9.084	9.52	173.084	-	-	-	-	-	117.524	290.608
Kaltara	1.050.378	2.195.330	59.094	3.304.802	-	1.268.539	-	1.268.539	1.055.771	1.368.018	6.997.129
Keterangan ;											
HP	= Hutan Produksi				KPA	= Kawasan Pelestarian Alam					
HPT	= Hutan Produksi Terbatas				TB	= Taman Buru					
HPK	= Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi				APL	= Areal Penggunaan Lain					
KSA	= Kawasan Suaka Alam										


Gambar 1. Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar IV-1. Peta sebaran kawasan hutan berdasarkan fungsinya

III. PENGUSAHAAN HUTAN SKALA BESAR

Pengusahaan hutan skala besar adalah pengusahaan pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan modal besar dengan wilayah kelola yang cukup luas. Umumnya pengelola adalah pihak swasta nasional dan internasional serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kehutanan. Bentuk perizinan yang diberikan untuk pemegang konsesi adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), baik dengan sistem pengelolaan Hutan Alam (HA) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).




Di Kabupaten Bulungan terdapat 5 pemegang izin IUPHHK dengan luas hak kelola 149.485 ha terdiri dari 3 izin IUPHHK-HA dengan luas hak kelola 131.110 ha (87,7% dari total luas izin kelola IUPHHK) dan 2 izin IUPHHK-HT dengan luas kelola 18.375 ha (12,3% dari total luas izin kelola IUPHHK). Selain itu, terdapat juga 7 izin IUPHHK-HA dan 2 izin IUPHHK-HT yang lintas wilayah antara kabupaten Bulungan dengan kabupaten/kota lain.

Di Kabupaten Nunukan terdapat 4 pemegang izin IUPHHK dengan luas hak kelola 187.940 ha yang terdiri dari 3 izin IUPHHK-HA dengan luas hak kelola 187.940 ha 94,9% dari total luas izin kelola IUPHHK) dan 1 izin IUPHHK-HT dengan luas kelola 18.375 ha (5,1% dari total luas izin kelola IUPHHK).

Di Kabupaten Malinau terdapat 14 IUPHHK-HA yang dulu sebutannya adalah HPH dengan luas kelola 1.204.485 ha.

Dari 14 pemegang izin IUPHHK-HA yang ada tersebut hanya IUPHHK-HA yang aktif, ada 2 IUPHHK-HA yang masa izinnya sudah berakhir dan ada 4 IUPHHK-HA yang tidak aktif.



Di Kabupaten Tana Tidung ada 2 IUPHHK-HT yang aktif dengan luas kelola 97.860 ha. Perizinan lintas wilayah antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lainnya di Kaltara, terdapat 2 izin IUPHHK-HA dan 2 izin IUPHHK-HT

Secara rinci data pemegang izin IUPHHK (HA dan HT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara serta luasan konsesinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kabupaten/Kota Perusahaan	SK Izin Pengelolaan	Rentang Waktu Hak Pengelolaan	Lokasi Kelola	Luas Hak Kelola (ha)	Keterangan
Bulungan						
1	PT. Inhutani I Unit Pimping	SK.200/Mehut-II/2006 Tgl. 2 Juni 2006	1993 s/d 2038	Bulungan	45.480	IUPHHK-HA
2	PT. Inhutani I Unit Pangean	SK.45/Menhut-II/2006 Tgl. 2 Maret 2006	1993 s/d 2038	Bulungan	50.230	IUPHHK-HA
3	PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai	SK.323/Menhut-II/2009 Tgl. 29 Mei 2009	2009 s/d 2054	Bulungan	35.400	IUPHHK-HA
4	PT. Estetika Rimba	240/Kpts-II/1992		Bulungan	5.000	IUPHHK-HT
5	PT. Kayan Makmur Sejahtera	SK.46/Menhut-II/2011 Tgl. 18 Februari 2011		Bulungan	13.375	IUPHHK-HT
Sub Total					149.485	
Nunukan						
1	PT. Adimitra Lestari	SK.202/Menhut-II/2008 Tgl. 21 Mei 2008	2008 s/d 2033	Nunukan	52.100	IUPHHK-HA
2	KSU. Meranti Tumbuh Indah	SK.204/Menhut-II/2006 Tgl. 8 Juni 2006		Nunukan	15.080	IUPHHK-HA
3	PT. Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut	SK.560/Menhut-II/2006 Tgl. 29 Desember 2006	1993 s/d 2038	Nunukan	120.760	IUPHHK-HA
4	PT. Inhutani I Perumpuk	SK.656/Menhut-II/1995 Tgl. 24 April 1995		Nunukan	10.000	IUPHHK-HT
Sub Total					197.940	
Malinau						
1	PT. Inhutani I Kunyit-Simendurut	SK.560/Menhut-II/2006 Tgl.29 Desember 2006	2006 s/d 2051	Semendurut	120.760	IUPHHK-HA (Aktif)
2	PT. Sumalindo Jaya Tbk.	SK.438/Menhut-II/2009 Tgl. 27 Juli 2009		Malinau	69.765	IUPHHK-HA

No.	Kabupaten/Kota Perusahaan	SK Izin Pengelolaan	Rentang Waktu Hak Pengelolaan	Lokasi Kelola	Luas Hak Kelola (ha)	Keterangan
3	PT. Inhutani II Sub Malinau	SK 664/Menhut-II/2011 Tgl. 24 November 2011	2011 s/d 2056	Malinau Selatan	29.040	IUPHHK-H A Aktif
4	PT. Inhutani II Sub Sei Tubu	SK.158/Kpts-II/1994 Tgl. 20 April 1994	1994 s/d 2014	Mentarang/ Sei Tubu	99.100	IUPHHK-H A (Aktif)
5	PT. Inhutani II Sub Semamu	SK.578/Menhut-II/2009 Tgl. 1 Oktober 2009	2009 s/d 2054	Mentarang Hulu	71.375	IUPHHK-H A (Aktif)
6	PT Meranti Sakti Indonesia	SK.69/Menhut-II/2009 Tgl. 26 Februari 2009	2009 s/d 2029	Malinau Selatan	50.604,71	IUPHHK-H A (Aktif)
7	PT. Wana Adiprima Mandiri	SK.196/Menhut-II/2006 Tgl. 1 Juni 2006	2006 s/d 2026	Mentarang	33.090	IUPHHK-H A (Aktif)
8	PT. Sarana Trirasa Bhakti	SK.523/Menhut-II/2009 Tgl. 09 September 2009	2009 s/d 2054	Sei Bahau	35.090	IUPHHK- HA(Aktif)
9	PT. Batu Karang Sakti	SK.66/Menhut-II/2006 Tgl. 26 Maret 2006	2006 s/d 2026	Mentarang Hulu /Sei Tubu	47.540	IUPHHK- HA(Tida k Aktif)
10	PT. Rimba Makmur sentosa	SK.178/Menhut-II/2007 Tgl. 1 Mei 2007	2007 s/d 2027	Malinau Selatan	43.530	IUPHHK-H A (Aktif)
11	PT. Essam timber	SK.633/Kpts-II/1992 Tgl. 22 Juni 1992	1992 s/d 2012	Sei Boh	355.000	IUPHHK-HA (Tidak Aktif)
12	PT. Gunung Sidi Makmur Sukses	SK.123/Menhut-II/2010 Tgl. 18 Maret 2010	2010 s/d 2055	Malinau Selatan	34.255	IUPHHK-HA (Tidak Aktif)
13	PT. Permata Borneo Abadi	SK.300/Menhut-II/2008 Tgl. 03 September 2008	2008 s/d 2053	Mentarang Hulu /Sei Tubu	34.000	IUPHHK-HA (Tidak Aktif)
14	PT. Hutan Sumber Alam Abadi	SK.557/Menhut-VI/2011 Tgl. 28 Januari 2011		Malinau	181.335	IUPHHK-HA
Sub Total					1.204.485	

No.	Kabupaten/Kota Perusahaan	SK Izin Pengelolaan	Rentang Waktu Hak Pengelolaan	Lokasi Kelola	Luas Hak Kelola (ha)	Keterangan
Tana Tidung						
1	PT. Adindo Hutan Lestari	SK.88/Kpts-II/1996 Tgl.12 Maret 1996	1996 s/d 2035	Kec. Sesayap dan Kec. Sesayap Ilir	55.810	IUPHHK-HT Aktif
2	PT. Intraca Wood Manufacturing	SK.13/Kpts-II/1997 Tgl.6 Januari 1997	1997 s/d 2040	Kec. Sesayap dan Kec. Sesayap Ilir	42.050	Aktif
Sub Total					97.860	
Lintas Wilayah						
1	PT. Karya Jaya Parakawan	SK.388/Kpts-II/1989		Nunukan, Malinau	40.000	IUPHHK-HA (proses perpanjangan)
2	PT. Sylvia Ery Timber	606/Kpts-II/1992 Tgl. 27 April 1992		Nunukan, Tana Tidung	56.000	IUPHHK-HA
3	PT. Intraca Wood Manufacturing	SK.335/Menhut-ii/2004 Tgl. 31 Agustus 2004	2004 s/d 2049	Bulungan, Malinau (Malinau Selatan/ Sei Gong Solok), Tana Tidung	195.110	IUPHHK-HA (Aktif)
4	PT. Inhutani I Unit Segah Hulu	SK. 44/Menhut-II/2006 Tgl. 2 Maret 2006	1993 s/d 2038	Bulungan, Berau (Kaltim)	54.230 (Bulungan = 7.058,54 dan Berau = 28.854,25)	IUPHHK-HA
5	PT. ITCI Kayan Hutani	SK.160/Menhut-II/2005 Tgl. 7 Juni 2005	1995 s/d 2015	Bulungan, Berau (KALTIM): 2.267,50 ha	218.317	IUPHHK-HA
6	PT. Rimba Karya Rayatama	SK.384/Menhut-II/2009 Tgl. 2 Juli 2009		Malinau, Mahakam Ulu (KALTIM): 4.484,11	143.970	IUPHHK-HA

No.	Kabupaten/Kota Perusahaan	SK Izin Pengelolaan	Rentang Waktu Hak Pengelolaan	Lokasi Kelola	Luas Hak Kelola (ha)	Keterangan
7	PT.Civika Wana Lestari (Eks.Damukti)	SK.843/Kpts-II/1999 Tgl. 7 Oktober 1999	1999 s/d 2054	Malinau (Sei Bahau), Bulungan	53.000	IUPHHK-HA (Aktif)
8	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	SK. 400/Menhut-II/2004 Tgl.18 Oktober 2004	2004 s/d 2049	Malinau (Sei Boh), Mahakam Ulu (Kaltim) : 43.547,23 ha	267.600	IUPHHK-HA (Tidak Aktif)
9	PT. Inhutani I Unit Sambarata	SK.195/Menhut-II/2006 Tgl. 1 Juni 2006		Berau (KALTIM): 80.512,76 ha, Bulungan	106.020	IUPHHK-HA
10	PT. Rizki Kacida Reana	SK.60/Menhut-II/2009 Tgl. 16 Februari 2009		Bulungan, Berau (KALTIM): 10.655,59 ha + 256,14 ha	55.150	IUPHHK-HA
11	PT. Widya Artha Perdana	SK.439/Kpts-II/2009 Tgl. 7 September 2009		Bulungan, Berau (KALTIM): 3.568,14 ha	14.800	IUPHHK-HA
12	PT Kemakmuran Berkah Timber	SK.199/Menhut-II/2014 Tgl. 27 Februari 2014		Kutai Barat (KALTIM): 106.480,28 ha, Malinau	112.023	IUPHHK-HA
13	PT. Adindo Hutani Lestari	88/Kpts-II/1996		Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Bulungan	201.821	IUPHHK-HT
14	PT. Intraca Hutani Lestari	838/Kpts-II/1999		Tana Tidung, Malinau, Bulungan	42.050	IUPHHK-HT
	Sub Total				1.560.091	
	Total				3.209.861	

IV. Industri Hasil Hutan

- Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) terdiri dari:
 - a. Industri Penggergajian Kayu;
 - b. Industri Serpih Kayu (wood chip);
 - c. Industri Vinir (veneer);
 - d. Industri Kayu Lapis (Plywood); dan *Laminated Veneer Lumber* .




Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (2015),

Kabupaten Bulungan tercatat memiliki 10 izin usaha pengolahan kayu diantaranya 7 Industri Hasil Hutan yang tidak aktif dan 3 Industri Hasil Hutan yang masih aktif.

Kota Tarakan tercatat memiliki 7 izin usaha pengolahan kayu diantaranya 3 Industri Hasil Hutan yang tidak aktif dan 4 Industri Hasil Hutan yang masih aktif.

Kota Nunukan tercatat memiliki 18 izin usaha pengolahan kayu diantaranya 5 Industri Hasil Hutan yang tidak aktif, 4 Industri Hasil Hutan yang masih tahap proses RPBBI, 2 Industri Hasil Hutan yang masih tahap proses mutasi lokasi dan 7 Industri Hasil Hutan yang tidak melakukan kegiatan fisik (stagnan).



Untuk Kabupaten Malinau tidak terdapat perijinan industri hasil hutan dan Kabupaten Tana Tidung baru dalam tahap kepengurusan administrasi dalam hal persyaratan perijinan industri hasil hutan dengan skala 6000 M3/ tahun

HUTAN TANAMAN RAKYAT:

Luas pencadangan sebesar 2.090 ha berada di Kabupaten Bulungan. Sudah diterbitkan ijin 31 IUPHHK-HTR perorangan dengan luas total 92 ha dengan pola mandiri.

**6 SASARAN RENCANA
AKSI KORSUP
KEHUTANAN**

**PENYELESAIAN
PENGUKUHAN
KAWASAN HUTAN DAN
PENATAAN RUANG DAN
WILAYAH ADMINISTRASI**

**PELAKSANAAN
PENATAAN PERIZINAN**

**PERLUASAN WILAYAH
KELOLA MASYARAKAT**

**PENYELESAIAN KONFLIK
KAWASAN HUTAN**

**PENGUATAN INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PERLINDUNGAN
HUTAN**

**MEMBANGUN SISTEM
PENGENDALIAN ANTI
KORUPSI**

RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

**MEMBENTUK TIM INVENTARISASI
PENGUSAHAAN, PEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH (I 4PT)**

Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRW .

**MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DALAM
KAWASAN HUTAN**

Mendorong dilaksanakannya evaluasi serta penyelesaian Hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan Batas Kawasan Hutan.

**MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN
DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA**

Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan Kawasan Hutan di Prov. Kaltara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.

**MELAKUKAN PENERTIBAN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR
DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN**

Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum, Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai prosedur.

RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN

- Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan dan pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya dari pemegang izin;
- Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota, serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- Menyampaikan data dan informasi pendukung yang terkait dengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untuk melakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dan komitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiap pelanggaran terjadi.

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan wilayah kelola masyarakat:
 - Proses dan status tahapan perizinan;
 - Aktifitas lapangan; dan
 - Kendala permasalahan pengelolaan kawasan.
- b. Sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat, untuk meningkatkan minat masyarakat secara aktif dan partisipatif;
- c. Mendorong pengembangan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih efektif dan efisien (kemitraan);



PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

- Membantu melakukan proses identifikasi terhadap penggunaan lahan yang di indikasikan berpotensi konflik dengan batas kawasan hutan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Melaksanakan sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke pada para pihak terkait.

PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

- Sedang disusun draft Peraturan Gubernur tentang Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup;
- Mendorong Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) pada kabupaten yang belum membentuk kelembagaan KPH tersebut.

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

- Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinan kehutanan melalui BPMD dan Investasi Daerah Prov. Kaltara;
- Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;
- Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkat tapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan;

**RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI
DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN
NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER
DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR
PERKEBUNAN DI KALIMANTAN UTARA**



**3 SASARAN
RENCANA
AKSI KORSUP
PERKEBUNAN**



**PELAKSANAAN PENATAAN
PERIZINAN PERKEBUNAN**



**PERLUASAN WILAYAH
KELOLA MASYARAKAT**



**MEMBANGUN SISTEM
PENGENDALIAN ANTI
KORUPSI**



PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN

**MELAKUKAN
PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI SEMUA
KEWAJIBAN KEUANGAN
DAN KEWAJIBAN LAINNYA
DARI PEMEGANG IZIN
USAHA PERKEBUNAN**

**1. MEMBENTUK TIM
PELAKSANA PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN**

**2. MELAKUKAN PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN**

**3. MENETAPKAN HASIL
PENILAIAN USAHA
PERKEBUNAN**

PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

Melakukan Pendaftaran Terhadap Kegiatan Perkebunan yang dilakukan Masyarakat

- **Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota**

Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana Pembinaan Perkebunan Masyarakat

- **Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinasi dengan Bupati /Walikota Setempat**

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan

2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan

3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan

SEKTOR PERKEBUNAN

DATA REALISASI TANAMAN PERKEBUNAN PER JULI 2015 KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALTARA

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	IJIN LOKASI		IUP		REALISASI		
			No	Luas	No	Luas	LC	TANAM	SIAP TANAM
1	PT. Sanjung Makmur	Sekatak	522.1/21/Ek/IL-V/2011	11,781.17	521/04/Distan-III/XI/2004	20,000.00	7,908.98	6,209.30	1,699.68
2	PT. Sanggam Kahuripan Indonesia	Tg. Pls Tengah	37/HGU/BPN RI/2010	5,941.35	521/01/Distan-III/IV/2004	16,000.00	5,917.00	5,774.00	143.00
3	PT. Citra Sawit Lestari	Tg Pls Utara	69/HGU/BPN RI/2009	5,362.35	25/K-II/520/2008	15,000.00	4,842.19	4,045.84	796.35
4	PT. Pipit Mutiara Indah	Sekatak	168/HGU/BPN RI/2009	14,177.21	521/14/Distan-III/XII/2005	20,000.00	8,912.77	8,333.00	579.77
5	PT. Tunas Borneo Plantation	Tg. Selor	522.1/10/Ek/IL-III/2011	12,307.00	286/K-IV/520/2009	16,414.60	3,995.80	2,548.23	1,447.57
6	PT. Abdi Borneo Plantation	Tg. Selor	522.1/12/Ek/IL-IV/2011	14,600.00	287/K-IV/520/2009	14,600.00	3,877.77	2,231.24	1,646.53
7	PT. Inti Selaras Perkasa	Peso Hilir, Tg pls Barat	522.1/03/Ek/IL-II/2011	10,339.26	521/19/IUP/Distan-III/IV/2007	15,000.00	7,898.48	2,345.55	5,552.93
8	PT. Agro Sawitmas Lestari	Tg Pls Timur	522.1/32/Ek/IL-IX/2011	6,500.00	03/K-I/520/2010	5,429.00	4,385.94	2,978.27	1,407.67
9	PT. Prima Bahagia Permai (Binai estate)	Tg Pls Timur	522.1/34/Ek/IL-III/2009	11,610.00	521/15/Distan-III/VII/2006	11,200.00	5,930.11	4,537.40	1,392.71
10	PT. Dharma IntiSawit Lestari	Tg Pls Timur	522.1/01/Ek/IL-1/2010	11,682.00	660/K-VII/520/2010	11,682.00	6,709.57	2,382.00	4,327.57
11	PT. Sawit Berkas Sejahtera	Tg. Pls Timur	522.1/15/Ek/IL-IV/2011	9,100.00	521/24/IUP/Distan-III/VIII/2007	9,100.00	2,500.00	562.16	1,937.84
12	PT. Bulungan Citra Agro Persada	Tg. Pls Timur	38/HGU/BPN RI/2011	13,214.90	521/07/Distan-III/VI/2005	20,000.00	3,570.00	3,274.42	295.58
13	PT. Kayan Plantation	Peso	522.1/13/Ek/IL-III/2011	13,105.60	521/18/Distan-III/I/2007	15,400.00	1,200.26	957.39	242.87
14	PT. Bulungan Surya Mas Pratama	Sekatak	522.1/22/Ek/IL-V/2011	2,245.31	521/11/Distan-III/IX/2005	7,000.00	2,566.05	1,548.23	1,017.82
15	PT. Prima Bahagia Permai (sajau estate)	Tg. Pls Timur	522.1/16/Ek/IL-V/2012	5,134.66	521/25/IUP/Distan-III/VIII/2007	6,200.00	2,931.83	1,305.88	1,625.95
16	PT. Prima Tunas Kharisma	Tg Pls Barat,peso hilir, Tg Palas	522.1/04/Ek/IL-II/2011	13,431.68	521/21/Distan-III/IV/2007	20,000.00	8,402.22	3,421.55	4,980.67
17	PT. Sentosa Sukses Utama	Peso	522.1/05/Ek/IL-II/2011	7,704.94	521/20/Distan-III/IV/2007	15,000.00	7,878.94	2,766.45	5,112.49
18	PT. Gunung Agung Perkasa	Sekatak	522.1/23/Ek/IL-V/2011	4,626.33	145/K-II/522/2011	5,204.21	2,187.88	369.10	1,818.78
19	PT. Prima Bahagia Permai (Antutan estate)	Tg Pls Barat	522.1/03/Ek/IL-II/2012	6,135.57	328/K-V/521/2012	6,120.77	1,006.00	982.50	23.50
20	PT. Bulungan Surya Mas Pratama 2	Sekatak	522.1/27/Ek/IL-VII/2011	2,160.00	129/K-II/520/2011	2,127.76	889.98	420.09	469.89
21	PT. Pipit Mutiara Indah (Plasma)	Sekatak	522.1/3303/Ek/IL-X/2011	1,300.00	1001/K-XI/520/2011	1,299.69	1,168.88	650.00	518.88
22	PT. Sentosa Sukses Utama 2	Peso	522.1/14/Ek/IL-IV/2011	5,701.42	30/K-II/520/2009	5,802.33	-	-	-
23	PT. Kemilau Getah Kemuning	Peso	522.1/21/Ek/IL-VI/2012	5,000.00	427/K-VII/521/2012	3,214.00	1,122.78	301.27	821.51
24	PT. Synergy Agro Resource	Tg Pls Utara	522.1/02/Ek/IL-II/2012	5,000.00	455/K-VIII/520/2012	4,591.08	-	-	-
25	PT. Tunas Borneo Plantation 2	Tg. Selor	522.1/20/Ek/IL-V/2012	1,360.40	499/K-X/520/2012	1,324.00	-	-	-
TOTAL KESELURUHAN				199,521.14		267,709.44	95,803.43	57,943.87	37,859.56

Keterangan:

Sumber Bidang Kehutanan dan Perkebunan DPKKP Kaltara

**DATA PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE S/D DESEMBER 2014**

NO	KABUPATEN	LUAS IZIN LOKASI (Ha)	LUAS IZIN IUP (Ha)	REALISASI (Ha)	SISA LAHAN (Ha)
1	2	3	4	5	6
1	BULUNGAN	267,709.44	199,521.14	95,803.43	171,906.01
2	NUNUKAN	231,212.75	291,973.43	67,553.83	163,658.92
3	MALINAU	98,926.00	98,926.00	299.19	98,626.81
4	TANA TIDUNG	135,409.81	121,851.23	43,136.91	92,272.90
	JUMLAH	733,258.00	712,271.80	206,793.36	526,464.64

KETERANGAN :
LUAS KEBUN RAKYAT 16.742,00

PABRIK KELAPA SAWIT

KABUPATEN NUNUKAN :

1. PT. Nunukan Sawit Mas
2. PT. Tirta Madu Sawit Lestari
3. PT. Sebakis Inti Lestari
4. PT. Nunukan Jaya Lestari
5. PT. Karang Joang Hijau Lestari

KABUPATEN BULUNGAN :

1. PT. Sanggam Kahuripan Indonesia
2. PT. Pipit Mutiara Indah

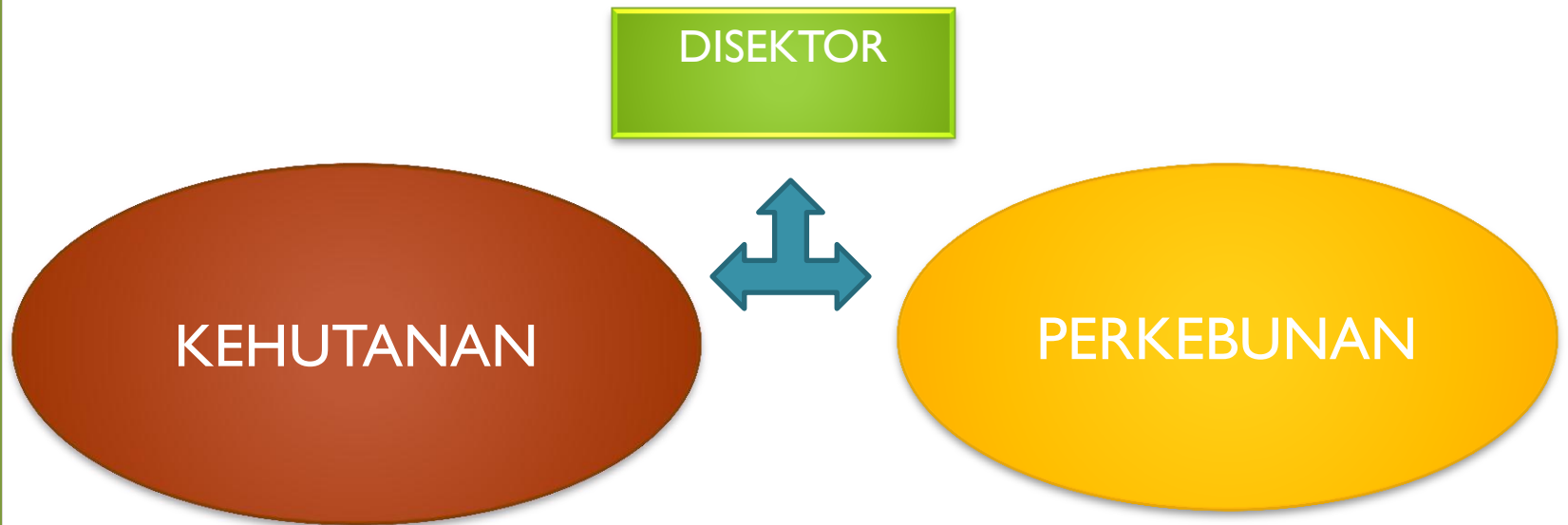
KABUPATEN MALINAU :

1. PT. Bukit Borneo Sejahtera

KABUPATEN TANA TIDUNG :

1. PT. Teknik Utama Mandiri

V. IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI



AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PENCEGAHAN REFORMASI LAYANAN PERIZINAN

A.

I.

Pelimpahan seluruh
kewenangan penerbitan Izin
dan Non Izin di Daerah ke
BKPM dan Perizinan
Terpadu

Biro Hukum
dan Organisasi,
BKPM dan
Perizinan
Terpadu

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

B.

2.

Peningkatan transparansi
pengelolaan anggaran Daerah



Biro
Keuangan dan
Aset

3.

Publikasi Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah dan rencana
Kerja Satuan Perangkat Daerah



BAPPEDA

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

B.

PELAKSANAAN E-
GOVERNMENT DAN
KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK

4.

Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Pembantu

**Biro Umum
dan Humas
Dinas
Perhubungan dan
Informatika**

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

C.

TRANSPARANSI PENGADAAN
BARANG DAN JASA PUBLIK

5.

Pelaksanaan Transparansi dan
akuntabilitas dalam mekanisme
pengadaan barang dan jasa



Biro
Layanan
Pengadaan

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

C.

PENYEDERHANAAN
PERIZINAN DALAM KAPASITAS
PUSAT DAN DAERAH

6.

Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah

BKPM dan
Perizinan
Terpadu,
Biro
Hukum dan
Organisasi

RENCANA AKSI :

1. Penyempurnaan dan penyederhanaan proses perijinan melalui BKPM dan Investasi Daerah
2. Fasilitasi penyusunan peraturan gubernur terkait Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Setulang Kabupaten Malinau.
3. Melakukan inventarisasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan.
4. Mendorong terbentuknya kelembagaan KPH di Kabupaten dan Kota.
5. Melakukan monev terhadap kinerja pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
6. Melakukan rekonsiliasi PNBK sektor kehutanan.
7. Melakukan monev terhadap kinerja pemegang ijin usaha perkebunan.
8. Melakukan inventarisasi dan pembinaan terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat.

KESIMPULAN

- **Provinsi Kalimantan Utara adalah DOB yang terbentuk dan masih dalam tahap penataan birokrasi sehingga rencana aksi yang akan dilaksanakan masih butuh waktu mengingat keterbatasan SDM dan minimnya sarana pendukung yang dimiliki.**
- **Sektor kehutanan dalam upaya penatausahaan kehutanan dilapangan sangat tergantung pada peraturan perUU yang berlaku, sehingga dengan terbitnya UU 23 tahun 2014 perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap peraturan2 sebelumnya sebagai pedoman baku, sehingga jelas peran dan fungsi masing2 para pihak.**



TERIMA KASIH